



Symposium on Bridging Government and Private Sector Contribution to Achieve Millennium Development Goals. Aryaduta Hotel, Pekanbaru, Riau, Indonesia: November 19th, 2007.
Organized by CSR Riau Pulp & Paper ©2007

Plenary Session 4 (15.00-16.30): Specific Approach to MDGs

Perbaikan Mutu Sekolah Dasar dan Menengah serta kesetaraan Gender di Provinsi Riau

**[Improving Primary and Secondary School Quality and Gender
Equity in Riau]**



Firdaus L.N.

Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau
Gedung Rektorat Universitas Riau Lt.4 Kampus Binawidya
Simpang Baru, Pekanbaru 28293, Riau, Indonesia

Author for correspondence

Prof.Dr.Firdaus LN,M.Si.
Phone/Fax:
+62761567092
E-mail:
firdausln@yahoo.com

Abstrak

Kertas kerja ini membatasi lingkup penerokaan terhadap dua dari delapan tujuan MDGs, yaitu Pendidikan Dasar dan Menengah (dikdasmen) serta Isu kesetaraan Gender di Provinsi Riau. Ianya diharapkan dapat membuka wacana dalam platform perbincangan ke arah peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan Riau sekarang dan ke depan terkait dengan implementasi MDGs Provinsi Riau; sekaligus menjawab cabaran globalisasi yang tak terelakkan. Berdasarkan analisis situasi dikdasmen dan kesetaraan gender di muka, diperoleh gambaran secara holistik bahwa masalah krusial yang mempengaruhi pencapaian target MDGs di provinsi Riau adalah berkaitan dengan masalah: (1) rendahnya mutu sarana pendidikan, (2) tingginya angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar, (3) kurang sesuainya kualifikasi guru, (4) kurang profesionalnya guru, (5) adanya kenderungan bias gender pendidikan untuk anak usia 16-18 tahun, dan (6) Mindset guru maupun pengelola pendidikan yang kurang mendukung pengembangan diri untuk pendidikan bermutu untuk semua. Reformasi pendidikan bagi Riau, khususnya pendidikan dasar mutlak diprioritaskan agar dapat dibangun suatu sistem pendidikan dasar yang lebih baik, mantap, kokoh dengan seoptimal mungkin menggerakkan partisipasi masyarakat yang terintegrasi secara vertikal dan selaras dengan Target MDGs. Perhatian yang lebih besar diberikan pada sekolah dasar dengan ditunjang oleh satau pertimbangan yang mengakomodir peranserta masyarakat dalam pencapaian visi Pendidikan Riau 2020, Visi Riau 2020, Visi Pendidikan Nasional 2025, Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), dan MDGs. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan kabupaten/kota sehingga mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah di di wilayah Riau. Komitmen ini hendaknya diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dengan tidak mengabaikan masalah kesetaraan gender. Peningkatan mutu guru dan perhatian yang lebih kepada guru yang berprestasi adalah condition sine qua non. Kebijakan yang holistik dan integratif dengan penuh integritas dalam implementasi diyakini akan dapat memainkan peran dalam akselerasi pencapaian target MDGs Provinsi Riau. Optimisme ini dilandasai oleh komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Program K2I serta didukung oleh DPRD Provinsi Riau melalui pengalokasian APBD yang akan ditingkatkan terus di masa mendatang.

Key words:

Gender equity, Millennium Development Goals, Primary and Secondary School, quality of education, Riau Province

Pembuka

Ada delapan fokus yang dibidik sebagai Target Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*, MDGs) yaitu: (1) pemberantasan kemiskinan ekstrim dan kelaparan; (2) mewujudkan pendidikan dasar secara universal; (3) mendorong kesetaraan jender; (4) mengurangi tingkat kematian anak; (5) meningkatkan kesehatan ibu; (6) memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit lain; (7) menjamin kelestarian lingkungan; dan (8) mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Kita (baca: Indonesia) termasuk dalam kelas Negara-negara mundur dalam implementasi program-program MDGs (MDGs Report 2006).

Indonesia masuk di kelas terbawah bersama Bangladesh, Laos, Mongolia, Myanmar, Pakistan, Papua Nugini, dan Filipina dengan nilai rapor negative, baik dalam Indeks Kemajuan maupun dalam status terkahirnya. Enam dari 23 indikator MDGs yang termasuk dalam kategori mundur, yaitu: (1) garis kemiskinan nasional, (2) kekurangan gizi, (3) kerusakan hutan, (4) emisi karbondioksida, (5) air bersih di perkotaan, dan (6) sanitasi di pedesaan. Dalam kategori ini, Negara-negara tersebut mengalami stagnasi, utamanya karena konflik politik yang tak berkesudahan sehingga mengusik upaya-upaya perbaikan mutu pembangunan. Kondisi tersebut diperparah oleh bencana, baik bersifat alamiah maupun akibat ulah manusia yang serakah (hedonis).

Gambaran tentang kinerja pencapaian target MDGs pada tataran global, regional, dan nasional tersebut juga masih relevan dan representatif untuk situasi di daerah kita (baca: Riau) yang namanya telah mendunia sebagai Provinsi Nomor Dua Terkaya sumber daya alamnya, akan tetapi masih tetap miskin dengan sumber daya manusia bermutu yang handal bersaing dalam kancah kompetisi global.

Kertas kerja jempukan ini membatasi lingkup penerokaan terhadap dua dari delapan tujuan MDGs, yaitu Pendidikan Dasar dan Menengah (dikdasmen) serta Isu kesetaraan Gender di Provinsi Riau; sebuah provinsi yang alokasi Anggaran Pendidikannya lebih dari dua puluh persen. Ianya diharapkan dapat membuka wacana dalam platform perbincangan ke arah peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan Riau sekarang dan ke depan terkait dengan implementasi MDGs Provinsi Riau; sekaligus menjawab cabaran globalisasi yang tak terelakkan.

Analisis Situasi Dikdasmen dan Kesetaraan Gender Provinsi Riau

Saat ini total jumlah satuan dikdasmen (minus PAUD dan Perguruan Tinggi) di Provinsi Riau mencapai 4.860 buah, terdiri dari Negeri 3.378 (69,5%) dan Swasta 1.482 (30,5%) dengan urutan prosentase jumlah dari yang terbanyak-Paling sedikit sbb: SD/MI/PLB (70,1%) – SMP/MTs (20,4%) - SMA/MA/SMK (9,4%). Akan tetapi prosentase kerusakan bangunan sekolah ini juga dahsyat, masing-masing untuk SD/MI/PLB (31,4%), SMP/MTs (37,7%), dan SMA/SMK/MA (37%). Tingkat kerusakan yang terendah 10,4% (Kota Pekanbaru) hingga prosentase kerusakan tertinggi 87,5% (Kabupaten Rokan Hulu). Rerata Prosentase kerusakan pada tingkat Provinsi Riau sebesar 37%.

Populasi siswa dan guru pada tahun 2006 mencapai 1.130.660 dan ^{15.156}..... orang. Rasio Murid-Guru adalah 1:22 (SD/MI), 1:14 (SMP/MTs), dan 1:15 (SMA/SMK/MA). Sedangkan rasio Murid:Kelas masing-masing 1:27 ; 1:37; dan 1:21. Total guru di Riau berjumlah 64.261 orang dengan kualifikasi S2 (0,7%), S1 (34,0%), D3 (12,5%), D2 (23,5%), D1 (7%), dan SMA (22,4%). Yang membuat kita risau adalah realitas empirik yang menunjukkan bahwa 20,6 % kualifikasi guru pada jenjang SD hanya lulusan setingkat SMA.

Situasi ini lebih memilukan bila dilihat dari hasil Sertifikasi Guru untuk alokasi tahun 2006 dan 2007. Prosentase Guru SD yang lulus 40,74%. Sedangkan hasil sementara untuk alokasi tahun 2007 untuk Guru SD/SMP hanya 45% yang lulus (Sekretariat Panitia Sertifikasi Guru Rayon V FKIP Universitas Riau per 16 Nopember 2007).

Angka Putus Sekolah SD/SMP/SMU Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota, Provinsi Riau 2005 cukup besar pada jenjang SD/MI yaitu 10,26%. Sedangkan di jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, masing-masing 1,85% dan 0,9%. Sebagian besar (>18 %) angka putus sekolah ini dijumpai di Kabupaten terbaru yaitu Rokan Hulu. Disusul Kabupaten Kuantan Singingi yang berkisar antara 15-18% (Firdaus L.N., 2007)

Kendatipun demikian Angka Partisipasi Kasar tahun 2005 meningkat untuk semua jenjang dibandingkan dengan dengan tahun 2006 seperti dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Sekolah Provinsi Riau tahun 2006

APK (%) PER JENJANG	2005		2006	
	Nasional	Riau	Nasional	Riau
APK SD/MI/SDLB/Paket A	94,30	94,13	94,48	96,29
APK SMP/MTs/SMPLB/Paket B	85,22	76,01	88,50	89,89
APK SMA/MA/SMK/SMALB/Paket C	52,20	56,51	56,20	68,76

Analisis Situasi Kesetaraan Gender Provinsi Riau

Gender adalah konstruksi sosial mengenai perbedaan peran dan kesempatan antara lelaki dan perempuan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Kesetaraan Gender di bidang pendidikan dalam kertas kerja ini dimaksudkan sebagai kesamaan kesempatan antara perempuan dan lelaki untuk memperoleh pendidikan. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kesenjangan Gender adalah Indeks Paritas Gender (IP) yaitu rasio antara Angka Partisipasi Pendidikan bagi perempuan dan bagi lelaki, dimana; nilai IP sama dengan satu mengindikasikan tidak terjadinya kesenjangan gender terhadap pendidikan, sementara nilai IP yang lebih dari satu bermakna lebih besarnya proporsi perempuan yang memperoleh akses terhadap pendidikan. Sebaliknya, nilai IP lebih kecil dari satu memberikan indikasi bahwa lebih besarnya proporsi lelaki yang memperoleh akses pendidikan dibanding perempuan.

Secara terinci, kesenjangan gender bidang pendidikan dapat dikenali dari tiga aspek yaitu pemerataan dan perluasan akses pendidikan, mutu dan relevansi serta *governance* dan akuntabilitas pendidikan. Untuk kepentingan analisis situasi kesenjangan akses dalam pendidikan akan digunakan partisipasi pendidikan penduduk baik menurut kelompok usia yang diukur dengan indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) untuk kelompok usia 7-12 tahun, 13-15 tahun, dan 16-18 tahun.

Merujuk pada data tahun 2004 (Tabel 2) terlihat bahwa ada kecenderungan tingkat partisipasi penduduk terhadap pendidikan semakin kecil dengan meningkatnya kelas umur atau jenjang pendidikan (dari SD-SMP-SMA), baik perempuan maupun lelaki.

Kendatipun demikian, berdasarkan Indeks Paritas diperoleh indikasi bahwa tidak ada kesenjangan gender terhadap pendidikan pada kelas umur 7-12 dan 13-15 tahun, kecuali untuk kelompok usia 16-18 tahun terdapat indikasi proporsi perempuan sedikit lebih besar aksesnya terhadap pendidikan bahkan di atas angka kesenjangan secara nasional.

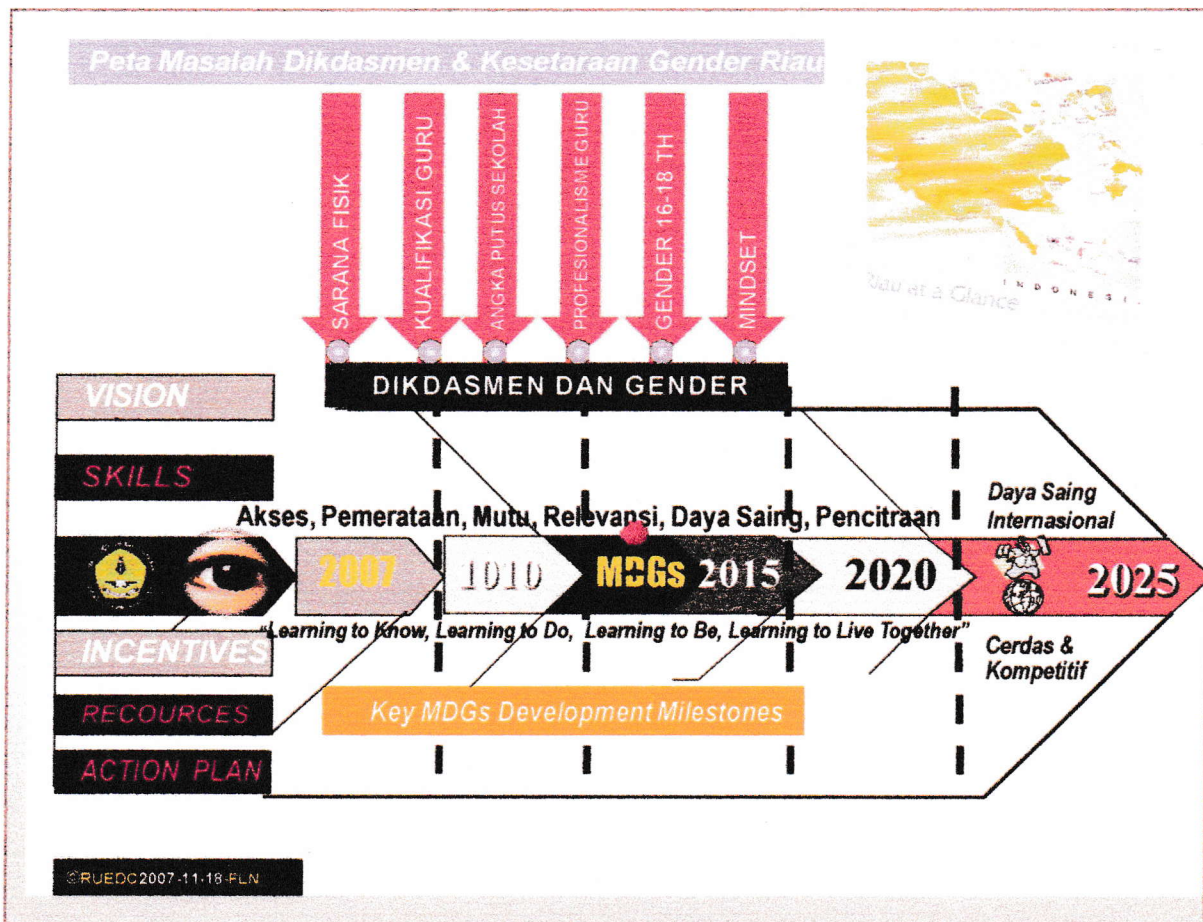
2. Angka Partisipasi Sekolah Penduduk (7-12), (13-15), dan (16-18) Tahun Provinsi Riau dan Jenis Kelamin, 2004

Usia Penduduk [Thn]	Perempuan	Lelaki	L+P	IP
7-12	97.30	97.25	97.27	1.00
Indonesia	96.92	96.62	96.77	1,00
13-15	89.13	89.44	89.29	1.00
Indonesia	83.97	83.05	83.49	1.01
16-18	60.59	59.48	60.03	1.01
Indonesia	52.97	53.94	53.48	0.99

Sumber: Susenas 2004

Peta masalah Dikdasmen dan Kesetaraan Gender Provinsi Riau

Berdasarkan analisis situasi dikdasmen dan kesetaraan gender di muka, diperoleh gambaran secara holistik bahwa masalah krusial yang mempengaruhi pencapaian target MDGs di provinsi Riau adalah berkaitan dengan masalah: (1) rendahnya mutu sarana pendidikan, (2) tingginya angka putus sekolah pada jenjang sekolah dasar, (3) kurang sesuainya kualifikasi guru, (4) kurang profesionalnya guru, (5) adanya kenderungan bias gender pendidikan untuk anak usia 16-18 tahun, dan (6) Mindset guru maupun pengelola pendidikan yang kurang mendukung pengembangan diri untuk pendidikan bermutu untuk semua.



Diskusi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Pendidikan di negara kita diselenggarakan melalui suatu Sistem Pendidikan Nasional yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003. Ianya meliputi keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara padu serta berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan hakikinya ialah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Strategi pembangunan manusia untuk pembangunan berkelanjutan menempatkan manusia sebagai pusat perhatian sebagaimana telah menjadi konsensus global MDGs. Sumberdaya Manusia (SDM) merupakan penggerak utama (*prime mover*) kemajuan pembangunan sebuah negara. Ia adalah satu-satunya *asset* yang dapat ditingkatkan nilainya. Rendahnya mutu SDM akan menjadi faktor penghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional karena kurang mampu menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan produk-produk yang memiliki daya saing. Lemahnya daya saing Indonesia dalam kancah dunia juga bertaut rapat dengan mutu sumber daya manusianya.

Oleh sebab itu penataan SDM dalam upaya pencapaian target MDGs 2015 perlu diupayakan secara serius secara bertahap dan berkesinambungan melalui sistem pendidikan yang bermutu, baik melalui jalur pendidikan formal, nonformal maupun informal. SDM yang bermutu merupakan kunci kesuksesan otonomi daerah (termasuk otonomi pendidikan) yang dalam dekade terakhir ini dipandang sebagai komponen paling menentukan dalam proses pembangunan. Tanpa itu, kekayaan daerah yang melimpah ruah tidak akan banyak memberikan manfaat bagi peningkatan taraf hidup penduduk negerinya.

SDM yang dibutuhkan di era globalisasi ini adalah SDM yang memiliki kemampuan menguasai, menerapkan dan mengembangkan ipteks serta berdaya saing tinggi. SDM yang demikian itu hanya dapat dikembangkan melalui sistem pendidikan yang handal. Sektor ini merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan kecakapan hidup (*life skills*) sebagai faktor penentu keberhasilan dalam memenangkan persaingan dalam kancah megakompetitif sekarang dan ke depan.

Obsesi kejayaan Riau di Asia Tenggara pada tahun 2020 telah menempatkan pendidikan pada posisi strategis dalam pembangunan, karena kita menyadari pendidikan sebagai sebuah bentuk *human investment* akan menjadi lebih penting dari pada investasi modal fisik dalam menunjang kekuatan ekonomi suatu daerah maupun negara untuk jangka waktu yang panjang. Itu lah sebabnya kenapa Provinsi Riau telah mengalokasikan anggaran Pembangunan Pendidikan melalui APBD melebihi apa yang menjadi ketentuan minimal perundang-undangan. Bahkan dalam APBD 2004, alokasi dana pendidikan Riau mencapai 23,5%. Sementara alokasi dana pendidikan secara nasional yang ditetapkan dalam UUD 1945 sebesar 20% baru akan terealisasi pada tahun 2009.

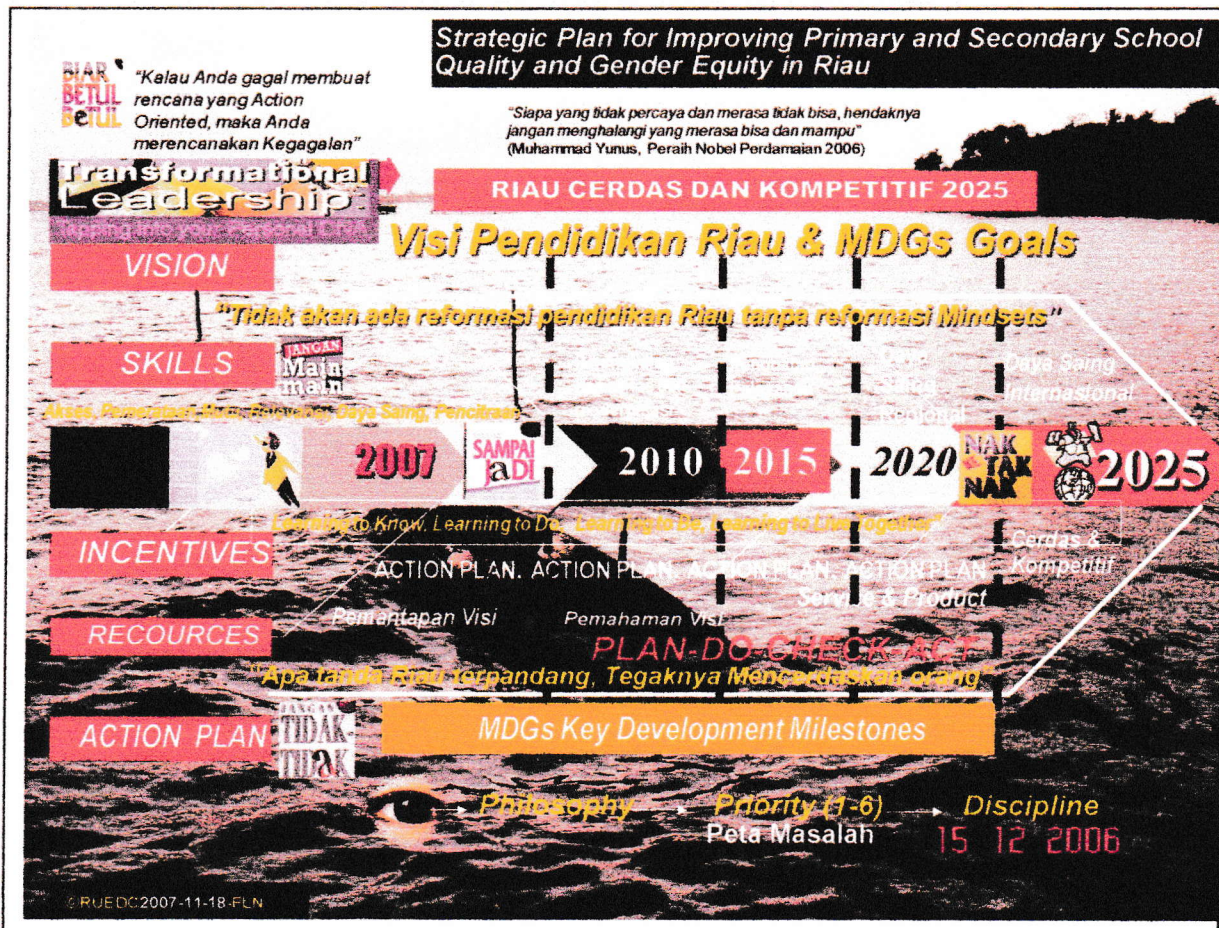
Namun di atas semua itu, realitas empirik memperlihatkan betapa Riau seakan-akan menerima "Kutukan Sumber Daya Alam" atau *Paradox of Plenty* meminjam istilah Stiglitz (2007); daerah yang mempunyai kekayaan sumber daya alam melimpah ruah tetapi tingkat kemiskinan penduduknya tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak mempunyai sumber daya alam sekaya Riau. Prosentase Penduduk Miskin Provinsi Riau pada tahun 2005 mencapai 20,96% yang melingkupi 22, 73% rumah tangga miskin (Rusli Zainal, 2007). Anggaran pendidikan Riau yang relatif tinggi ternyata kondisi bangunan sekolah yang rusak berat melebihi angka 30 persen. Demikian pula untuk prosentase guru yang berkualifikasi



S1. Bahkan lebih dari 20 persen guru diknasmen masih berkualifikasi SMA. Angka Putus Provinsi Riau 2005 cukup besar pada jenjang SD/MI. Sebagian besar (>18 %) angka putus sekolah ini dijumpai di Kabupaten terbaru.

Di lain sisi, ternyata guru di Provinsi Riau yang professional kompeten juga masih jauh dari harapan. Tingkat kelulusan guru yang mengikuti program sertifikasi masih kurang dari 50 persen, padahal insentif para guru di Riau hampir di setiap kabupaten Kota meningkat tajam, bahkan melampaui tunjangan fungsional Dosen di perguruan tinggi. Observasi penulis sebagai asesor dalam sertifikasi terhadap portofolio guru Rayon V LPTK Universitas Riau tahun 2007 memperlihatkan bahwa hampir tidak ada hubungan antara pengalaman mengajar dengan prestasi akademik dan produktivitas karya pengembangan profesi guru. Apatah lagi keikutsertaanya dalam forum ilmiah untuk menambah wawasan keguruannya bagi pengembangan diri sebagai guru yang professional. Determinan utama yang memberikan kontribusi terhadap tingkat kelulusan guru dalam sertifikasi adalah banyaknya pendidikan dan pelatihan yang diikuti meski banyak yang kurang relevan dengan tugas profesi atau mata pelajaran yang diampunya. Realitas empirik ini membawa pada sebuah tesis bahwa pelatihan-pelatihan kependidikan yang memperoleh porsi anggaran cukup besar, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota tidak akan menjamin peningkatan profesionalisme guru bila keikutsertaan guru yang bersangkutan tidak dilandasi oleh motivasi intrinsik untuk betul-betul mengembangkan diri. Persoalan ini lebih disebabkan oleh mindset guru dalam memandang profesinya.

Usulan Rencana Aksi Perbaikan Mutu Dikdasmen dan Kesetaraan Gender dalam mendukung pencapaian Target MDGs di Provinsi Riau.



Penutup

Reformasi pendidikan bagi Riau, khususnya pendidikan dasar mutlak diprioritaskan agar dapat dibangun suatu sistem pendidikan dasar yang lebih baik, mantap, kokoh dengan seoptimal mungkin menggerakkan partisipasi masyarakat yang terintegrasi secara vertikal dan selaras dengan Target MDGs. Perhatian yang lebih besar diberikan pada sekolah dasar dengan ditunjang oleh suatu pertimbangan yang mengakomodir peranserta masyarakat dalam pencapaian visi Pendidikan Riau 2020, Visi Riau 2020, Visi Pendidikan Nasional 2025, Pendidikan untuk Semua (*Education for All*), dan MDGs.

Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan kabupaten/kota sehingga mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan dasar dan menengah di wilayah Riau. Komitmen ini hendaknya diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan modernisasi sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah dengan tidak mengabaikan masalah kesetaraan gender. Peningkatan mutu guru dan perhatian yang lebih kepada guru yang berprestasi adalah *condition sine qua non*.

Kebijakan yang holistik dan integratif dengan penuh integritas dalam implementasi diyakini akan dapat memainkan peran dalam mengakselerasi pencapaian target MDGs Provinsi Riau. Optimisme ini dilandasi oleh komitmen yang tinggi dari Pemerintah Provinsi Riau melalui Program K2I serta didukung oleh DPRD Provinsi Riau melalui pengalokasian APBD yang akan ditingkatkan terus di masa mendatang.

Senarai Rujukan

- Badan Pusat Statistik Propinsi Riau. (2004). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Propinsi Riau 2003 (Welfare Statistics of Riau Province 2003)*; Survey Sosial Ekonomi Nasional 2003.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. (2005). *Riau Dalam Angka 2005*. Pekanbaru
- Depdiknas. (2005). *Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009: Menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Jakarta
- Dinas Pendidikan Propinsi Riau. (2003). *Data dan Informasi Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2003 – 2004*. Pekanbaru.
- Firdaus L.N. (2005). *Riau Education for All*. Majalan FORUM Kerakyatan, Edisi Februari 2005, p.27
- Firdaus L.N. (2006). *Reformasi Pembelajaran Menuju Kualitas Insan Bertaraf Dunia*. Naskah Orasi Ilmiah Dies Natalis ke 44 Universitas Riau, 4 November 2006
- Firdaus L.N. (2003). *Sumber Daya Manusia, Pendidikan dan Masa Depan Riau*. In: Firdaus LN (Ed.). *Mosaik Pendidikan Riau*, pp. 18-33. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau. Pekanbaru.
- Firdaus L.N. (2007). *Peningkatan Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan Provinsi Riau*. Makalan disampaikan dalam Diskusi Analisis Kebijakan Pendidikan yang dilesenggaran oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional Jakarta. Pekanbaru, 2 Januari 2007
- Firdaus L.N. (2007). *Menjadi Guru Bertaraf Dunia*. Harian Batam Pos. Rabu, 21 Maret 2007
- Firdaus L.N. (2007). *Pendidikan Indonesia dan Malaysia dalam Kancah Pembangunan Manusia dan Cabaran Alaf Persaingan Antarabangsa*. In Zamri Mahamid et al. (Eds.). *Pendidikan Indonesia dan Malaysia: Satu Pengalaman di Riau*, pp. 59-68. Fakultas Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.
- National Coordination Forum Education for All. (2005). *National Plan of Action: Indonesia's Education for All 2003-2015*.
- PDIP. (2004). *Statistik Pendidikan Indonesia*. Balitbangdiknas, Jakarta.
- Pemerintah Provinsi Riau. (2004). *Peraturan Daerah Provinsi Riau Tahun Nomor: I Tahun 2004. Tentang Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Riau Tahun 2004 -2008*; Lembaran Daerah Provinsi Riau. Nomor: 2 Seri E Tahun 2004
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Stiglitz, J.E. (2007). *Making Globalization Work*. Mizan.Bandung
- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional. Departemen Pendidikan Nasional republic Indonesia.
- United Nation. (2006). *The Millennium Development Goals Report 2006*. New York.